

**ANALISIS KEPUTUSAN TIONGKOK DALAM MERATIFIKASI
FORCED LABOUR CONVENTION 1930 (NO.29) ILO PADA TAHUN 2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NUR ANITA

21323186

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**ANALISIS KEPUTUSAN TIONGKOK DALAM MERATIFIKASI
*FORCED LABOUR CONVENTION 1930 (NO.29) ILO PADA TAHUN 2022***

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NUR ANITA

21323186

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KEPUTUSAN TIONGKOK DALAM MERATIFIKASI
FORCED LABOUR CONVENTION 1930 (NO.29) ILO PADA TAHUN 2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

24 Juli 2025

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karing Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hasbi Aswar S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

24 Juli 2025



Nur Anita

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	12
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	15
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB 2.....	17
2.1 <i>Bureaucratic Influencers</i>	17
2.2 <i>Partisan Influencers</i>	21
2.3 <i>Interest Influencers</i>	27
2.4 <i>Mass Influencers</i>	31
BAB 3.....	36
3.1 Kondisi Ekonomi Tiongkok.....	36
3.2 Konteks Internasional.....	39
3.2.1 <i>Faktor Geopolitik</i>	39
3.2.2 <i>Faktor Ekonomi Internasional</i>	45
3.2.3 <i>Faktor Politik Internasional</i>	46
BAB 4.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Rekomendasi.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebijakan Terkait Tenaga Kerja di Tiongkok.....	25
Tabel 2. Performa GDP, GNI, FDI dan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Periode 2018-2022.....	37
Tabel 3. Daftar Nama Pejabat Tiongkok Yang Menerima Sanksi dari Uni Eropa.....	41
Tabel 4. Data Perusahaan Tiongkok yang Diblokir oleh AS.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Determinan Yang Memengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri...

10

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
UE	: Uni Eropa
UFLPA	: <i>Uyghur Forced Labor Prevention Act</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>
XPCC	: <i>Xinjiang Production and Construction Corps</i>

ABSTRAK

Isu kerja paksa merupakan permasalahan global yang berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor ketenagakerjaan. Salah satu instrumen penting dalam upaya penghapusannya adalah *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* yang diadopsi oleh *International Labour Organization* (ILO). Tiongkok, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, baru meratifikasi konvensi ini pada tahun 2022, setelah mendapat tekanan internasional atas dugaan praktik kerja paksa di wilayah Xinjiang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Tiongkok menggunakan *Decision Making Theory* dari William D. Coplin yang menekankan tiga determinan utama politik domestik, ekonomi, serta konteks internasional. Secara internal, dominasi Partai Komunis Tiongkok (PKT), tekanan dari kelompok kepentingan ekonomi, dan opini publik turut menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Secara eksternal, tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat, dorongan organisasi internasional seperti ILO dan PBB, serta faktor geopolitik menjadi pemicu utama ratifikasi. Ratifikasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki citra internasional dan menjaga stabilitas domestik. Namun, efektivitas implementasinya masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Kata Kunci: Coplin, *Forced Labour Convention No.29*, kebijakan luar negeri, Kerja paksa, Tiongkok

ABSTRACT

Forced labor is a global issue closely linked to human rights violations in the labor sector. One of the main instruments to combat it is the Forced Labour Convention, 1930 (No.29) adopted by the International Labour Organization (ILO). China, as the world's second-largest economic power, ratified the convention in 2022 after mounting international pressure over alleged forced labor in Xinjiang. This study analyzes the factors influencing China's decision using William D. Coplin's Decision Making Theory, which highlights three key determinants: domestic politics, economy and military, and international context. The findings show that China's decision was shaped by both internal and external factors. Internally, the dominance of the Chinese Communist Party (CCP), pressure from economic interest groups, and growing public awareness influenced the policy. Externally, diplomatic and economic pressure from Western countries, encouragement from organizations such as the ILO and UN, and geopolitical factors triggered the ratification. The decision is seen as a strategic move to improve international image and maintain domestic stability. However, its implementation remains a significant challenge.

Keywords: China, Coplin, forced labor, *Forced Labour Convention No.29*, foreign policy

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kerja paksa merupakan permasalahan yang kompleks dalam konteks global, karena sangat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan perkiraan global, diperkirakan terdapat sekitar 25 juta orang di seluruh dunia yang dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman atau paksaan (International Labour Organization 2022). Praktik ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap martabat individu, tetapi juga berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Kerja paksa menghambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan produktivitas, menciptakan ketimpangan upah, serta memperburuk kondisi sosial masyarakat. Selain itu, isu kerja paksa sering kali berhubungan dengan praktik-praktik lain yang melanggar hukum, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja. Kondisi ini memperburuk citra negara di mata dunia dan dapat berdampak pada hubungan diplomatik serta perdagangan internasional. Karena itu, penghapusan kerja paksa menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk *International Labour Organization* (ILO).

Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada ketenagakerjaan, *International Labour Organization* (ILO) memainkan peran penting dalam upaya penghapusan kerja paksa. ILO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1919 dengan tujuan

menciptakan standar internasional dalam ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja buruh di seluruh dunia (Liusanda 2019). Standar-standar ini diwujudkan dalam bentuk sebuah konvensi dan rekomendasi yang mengatur berbagai aspek dunia ketenagakerjaan termasuk perlindungan terhadap pekerja migran dan penghapusan kerja paksa. ILO memiliki struktur tripartit yang melibatkan pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan. Melalui pendekatan ini, ILO berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan dan hak dari semua pihak yang terkait.

Salah satu konvensi penting yang diadopsi oleh ILO pada tanggal 12 Juni 1930 adalah *Forced Labour Convention 1930, (No.29)* atau dikenal sebagai Konvensi Tenaga Kerja Paksa No.29/1930 terkait pelarangan segala bentuk kerja paksa. Konvensi ini bertujuan untuk menekan praktik kerja paksa dalam semua sektor dan aktivitas tanpa memandang jenis pekerjaan. Dalam konvensi ini, kerja paksa didefinisikan sebagai “semua pekerjaan atau layanan yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman dan untuk mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela” (OHCHR, n.d.).

Forced Labour Convention 1930, (No.29) mengharuskan negara-negara anggota yang meratifikasinya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan praktik kerja paksa dalam jangka waktu sesingkat mungkin, serta menjadikan praktik tersebut sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum secara pidana. Laporan *International Labour Organization* menunjukkan bahwa *Forced Labour Convention 1930, (No.29)* telah diratifikasi oleh 181 negara

anggota, termasuk Republik Rakyat Tiongkok yang baru saja meratifikasinya pada tanggal 12 Agustus 2022 dan menjadi negara ke-179 yang meratifikasi konvensi ILO No.29 1930. Saat ini Tiongkok tercatat telah meratifikasi enam konvensi inti ILO meliputi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* dan *Abolition of Forced Labour Convention 1957 (No. 105)* yang keduanya diratifikasi pada 12 Agustus 2022, *Equal Remuneration Convention 1951 (No. 100)* sejak 2 November 1990, *Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958 (No. 111)* pada 12 Januari 2006, *Minimum Age Convention 1973 (No. 138)* pada 28 April 1999, serta *Worst Forms of Child Labour Convention 1999 (No. 182)* pada 8 Agustus 2002.

Dua konvensi inti ILO yang belum diratifikasi ILO yaitu *Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention 1948 (No.87)* dan *Right to Organise and Collective Bargaining Convention 1948 (No.87)* dikarenakan sistem ketenagakerjaan domestik yang hanya mengakui satu serikat resmi, yaitu *All-China Federation of Trade Unions (ACFTU)*, yang berada di bawah pengaruh langsung Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memandang bahwa pembentukan serikat independen dapat menimbulkan instabilitas sosial dan membuka ruang bagi mobilisasi politik yang tidak diinginkan

Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia dan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang, Tiongkok menghadapi tantangan unik dalam hal ketenagakerjaan. Selama bertahun-tahun, negara ini menghadapi kritik internasional terkait praktik ketenagakerjaan, termasuk tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kerja paksa di berbagai sektor, terutama di industri-industri yang memproduksi barang untuk pasar global. Meskipun demikian, Tiongkok

tidak segera meratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)*, yang menunjukkan adanya ketidakpastian dan pertimbangan yang kompleks dalam kebijakan ketenagakerjaan nasionalnya.

Ratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)* oleh Tiongkok pada tahun 2022 menjadi langkah penting yang menunjukkan adanya pengaruh kondisi politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri terhadap kebijakan luar negerinya. Pertama, faktor politik internasional memainkan peran penting dalam keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)*. Sejak tahun 2017, Tiongkok mulai mencuri perhatian global karena dugaan praktik kerja paksa kepada minoritas etnis uyghur di wilayah Xinjiang. Pada tahun 2020, Tiongkok mulai menghadapi tekanan yang semakin besar dari negara-negara Barat dan organisasi internasional untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya. Kritikan tersebut sering kali dipusatkan pada praktik kerja paksa di Xinjiang dan sektor-sektor lainnya. Kasus kapal Long Xing 629 pada tahun 2019 yang melibatkan tuduhan eksploitasi pekerja migran Indonesia di industri perikanan serta laporan-laporan tentang kerja paksa di Xinjiang semakin memperkuat tekanan internasional terhadap Tiongkok. Sebagai respons terhadap tekanan yang diberikan global, pada tahun 2022 Tiongkok akhirnya memutuskan untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)* sebagai upaya untuk meredakan kritik internasional dan memperbaiki citranya terkait isu-isu ketenagakerjaan dan meningkatkan citra Tiongkok di mata dunia, terutama menjelang pertemuan internasional dan acara-acara besar seperti Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing.

Kedua, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat signifikan. Tiongkok merupakan salah satu negara penghasil barang dan jasa terbesar di dunia, dengan ketergantungan yang tinggi pada ekspor sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonominya. Di era globalisasi ini, perusahaan multinasional semakin memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan etika dalam rantai pasokan. Dengan meratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)*, Tiongkok dapat memberikan sinyal positif kepada investor dan mitra dagang mengenai komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi kerja serta mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia. Langkah ini berpotensi memperkuat daya tarik Tiongkok dalam menarik investasi asing dan meningkatkan akses ke pasar internasional. Selain itu, perubahan dalam kebijakan domestik juga berkontribusi pada keputusan Tiongkok untuk meratifikasi konvensi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dan menanggapi keluhan tentang kondisi kerja di dalam negeri. Dengan meratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)*, pemerintah Tiongkok dapat memperkuat kebijakan ketenagakerjaan nasionalnya dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mematuhi standar internasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, ratifikasi *Forced Labour Convention 1930, (No.29)* tidak berarti bahwa semua masalah terkait kerja paksa akan teratasi dengan segera. Meskipun Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi konvensi ini, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tetap besar. Praktik kerja paksa masih ada di berbagai sektor,

dan penegakan hukum yang lemah sering kali menjadi penghalang dalam upaya untuk memperbaiki situasi.

Proses ratifikasi oleh Tiongkok ini sangat menarik, dimana Tiongkok menjadi negara yang menunda ratifikasi tersebut. Kedua, sikap penolakan Tiongkok kemudian diubah dengan justru melakukan ratifikasi konvensi ILO pada tahun 2022. Dari dua hal tersebut cukup untuk menjadi latar belakang atau alasan Tiongkok yang pada akhirnya melakukan ratifikasi terhadap *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan Tiongkok dalam meratifikasi *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi keputusan Tiongkok dalam meratifikasi *Forced Labour Convention, 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Tiongkok meratifikasi *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022. Maka dari itu, penulis membatasi penelitian ini dimulai pada periode menjelang tahun 2022. Penulis membahas latar belakang keputusan ratifikasi tersebut, baik dari aspek tekanan internasional yang diterima Tiongkok terkait isu kerja paksa

maupun kepentingan domestik yang memengaruhi kebijakan tersebut. Penulis juga menganalisis bagaimana tekanan global, seperti kritik atas isu hak asasi manusia dan sanksi ekonomi, serta kebutuhan Tiongkok untuk menjaga citra dan hubungan internasionalnya, menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut. Fokus pada tahun 2022 dipilih karena pada tahun tersebut Tiongkok secara resmi meratifikasi konvensi ini di tengah meningkatnya sorotan global terhadap praktik kerja paksa di wilayah Xinjiang.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba melihat lebih jauh alasan di balik keputusan Tiongkok dalam meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022, terutama dengan menyoroti isu tekanan dari dunia internasional terkait praktik kerja paksa di Xinjiang, dan arah kebijakan luar negeri Tiongkok.

Penelitian pertama yang akan ditinjau adalah jurnal milik Nicola Macbean (2022) yang berjudul “*China's Ratification of the ILO Forced Labour Conventions: A Hollow Gesture?*” yang diterbitkan dalam *Made in China Journal*. Jurnal ini membahas motif di balik keputusan Tiongkok untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Berdasarkan teori pengambilan keputusan William D. Coplin, jurnal ini menguraikan bagaimana keputusan Tiongkok dipengaruhi oleh politik domestik dan konteks internasional. Dari sisi politik domestik, Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak lepas dari pengaruh *policy influencers* seperti birokrasi pemerintahan dan partai politik. Dalam

konteks ini, ratifikasi dilakukan oleh pemerintah Tiongkok sebagai strategi untuk mempertahankan legitimasi di tengah tekanan masyarakat internasional terkait isu kerja paksa di Xinjiang. Di sisi lain, dari konteks internasional, keputusan ini juga muncul akibat tekanan dari negara-negara Barat dan organisasi internasional yang mengecam dugaan pelanggaran HAM di Tiongkok. Jurnal ini juga menekankan bahwa langkah Tiongkok lebih bersifat simbolis dibandingkan sebagai upaya substantif dalam melindungi hak asasi manusia (Macbean 2022).

Penelitian kedua yang relevan adalah jurnal milik Sonja Schaefer (2023) yang berjudul *“The Muddled Governance of State-Imposed Forced Labour: Multinational Corporations, States, and Cotton from China and Uzbekistan”* diterbitkan oleh Taylor & Francis. Jurnal ini mengkaji fenomena kerja paksa yang dipaksakan oleh negara dalam industri kapas di Tiongkok dan Uzbekistan (Schaefer 2023). Menurut teori pengambilan keputusan William D. Coplin, keputusan ini merupakan faktor politik domestik dan kekuatan ekonomi. Terdapat kebutuhan ekonomi dalam negeri yang mendorong negara untuk mempertahankan praktik kerja paksa sebagai strategi efisiensi produksi, terutama di sektor pertanian dan industri. Di sisi lain, faktor eksternal berupa tekanan dari organisasi internasional dan masyarakat global juga turut membentuk kalkulasi pemerintah Tiongkok dalam mempertahankan atau mengubah kebijakan yang ada. Selain itu, William D. Coplin menegaskan bahwa kekuatan ekonomi dan militer suatu negara akan menentukan ruang geraknya di panggung internasional. Maka, Tiongkok yang memiliki kekuatan ekonomi besar cenderung berani mengambil posisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma internasional, selama dapat menjaga stabilitas dan kontrol dalam negeri.

Penelitian ketiga yang akan ditinjau adalah jurnal milik Adrian Zenz (2023) yang berjudul “*Measuring Non-Internment State-Imposed Forced Labor in Xinjiang*” yang juga diterbitkan oleh Taylor & Francis. Jurnal ini merupakan analisis akademis yang berfokus pada metode pengukuran kerja paksa yang tidak terkait dengan penahanan, khususnya di wilayah Xinjiang (Zenz 2023). Merujuk pada teori pengambilan keputusan William D. Coplin, jurnal ini menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah Tiongkok untuk mempertahankan program kerja paksa di Xinjiang merupakan hasil dari pertimbangan politik domestik serta kekuatan ekonomi dan militer. Kebijakan tersebut dijalankan oleh aktor-aktor negara yang berada dalam struktur birokrasi, yang dalam istilah Coplin disebut sebagai *bureaucratic influencers*. Selain itu, opini publik dalam negeri yang dibentuk melalui media juga berfungsi sebagai *mass influencers* yang membantu melegitimasi kebijakan negara. Faktor eksternal berupa pengawasan internasional dan tekanan dari komunitas global juga memainkan peran, namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh kepentingan strategis negara. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok telah meratifikasi Konvensi ILO No. 29, kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas di lapangan masih sangat besar. Oleh karena itu, pengaruh struktur politik domestik dan kekuatan negara lebih dominan dalam pengambilan keputusan dibandingkan tekanan dari luar.

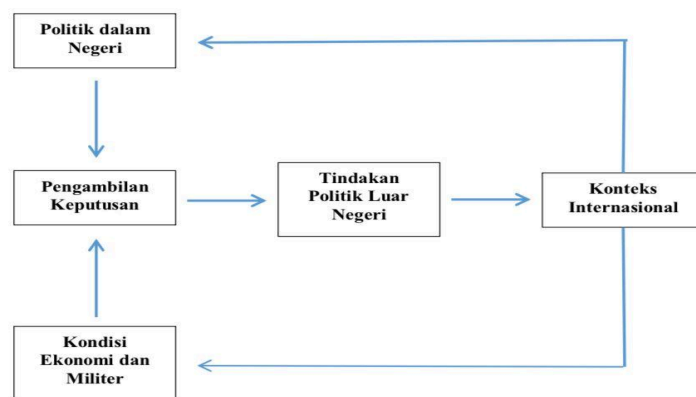
Penelitian yang ditulis oleh penulis akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam ketiga tinjauan pustaka tersebut, fokus utama berada pada isu kerja paksa di Tiongkok secara umum. Namun, penelitian ini akan secara spesifik menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* pada tahun 2022. Dengan

menggunakan teori pengambilan keputusan William D. Coplin, penelitian ini akan mengidentifikasi tiga faktor utama, yaitu faktor politik domestik, konteks internasional, serta kondisi ekonomi dan militer yang secara keseluruhan membentuk dasar pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis keputusan Tiongkok meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022, penulis akan menggunakan pendekatan Teori Pengambilan Keputusan atau *Decision Making Theory* yang dikembangkan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis” yang diterbitkan pada tahun 2003 oleh Sinar Baru Algensindo. Coplin berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga determinan yaitu politik dalam negeri, konteks internasional serta kondisi militer dan ekonomi.

Gambar 1. Bagan Determinan Yang Memengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri



Sumber : Coplin (2003)

Pertama, politik domestik. Coplin berpendapat bahwa dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dilihat dari sistem politiknya (Coplin 2003). Coplin menjelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan yang disebut *policy influencers*. William D. Coplin membagi *policy influencers* ke dalam empat kelompok pokok yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Pertama, *bureaucratic influencers* adalah individu atau organisasi eksekutif yang mendukung para pemimpin tertinggi seperti presiden dengan menyediakan data dan dukungan administratif untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Kedua, *partisan influencers* adalah partai politik atau kelompok politik yang berperan sebagai penghubung antara tuntutan masyarakat dan agenda politik resmi. Ketiga, *interest influencers* adalah kelompok yang terbentuk atas kepentingan bersama. Keempat adalah *mass influencers*, yakni opini publik yang dipengaruhi oleh media massa yang sering dijadikan alat legitimasi oleh pengambil keputusan sebagai upaya untuk menjelaskan atau membenarkan kebijakan luar negeri yang diambil (Coplin 2003).

Faktor kedua adalah konteks internasional, yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan akan didasarkan pada perhitungan internasional. Dalam teori nya, Coplin menjelaskan bahwa konteks internasional berkaitan dengan kondisi suatu negara, yang menjadi tujuan kebijakan luar negeri, dan pengaruh negara lain yang relevan dengan masalah yang dihadapi (Coplin 2003).

Faktor terakhir adalah kondisi ekonomi dan militer. Coplin menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi dan militer sebuah negara merupakan pilar utama dalam penentuan arah kebijakan luar negeri. Kalau sebuah negara memiliki struktur ekonomi yang kokoh, negara tersebut bisa memanfaatkan sumber daya untuk menjalankan diplomasi aktif, memperluas kegiatan perdagangan, serta memberi bantuan internasional. Keberhasilan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi memberi negara kepercayaan diri untuk mengejar peran yang lebih ambisius dalam arena global. Selain itu, Kekuatan militer menentukan sejauh mana negara itu bisa menjaga keamanannya sendiri dan memperlihatkan pengaruh kepada negara lain (Coplin 2003).

1.7 Argumen Sementara

Dalam menganalisis keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan atau *Decision Making Theory* dari William D. Coplin menjelaskan dalam bukunya *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu politik dalam negeri, konteks internasional, serta kondisi ekonomi dan militer. Pertama dari sisi politik dalam negeri, Coplin menjelaskan bahwa arah kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor dalam negeri yang disebut sebagai *policy influencers*. Partai Komunis Tiongkok (PKT) memainkan peran dominan sebagai *bureaucratic influencers* yang mengendalikan penuh proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kebijakan luar negeri. Di samping itu, opini publik atau *mass influencers* juga berperan dalam memberi

tekanan tidak langsung terhadap pemerintah, terutama melalui media sosial seperti Weibo dan WeChat yang semakin menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap isu ketenagakerjaan dan pelanggaran HAM. Kelompok kepentingan lain, seperti sektor industri dan buruh, dikategorikan sebagai *interest influencers* yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang dapat melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri dan memperbaiki kondisi kerja.

Kedua, dari sisi konteks internasional, Tiongkok menghadapi tekanan kuat dari negara-negara Barat terkait dugaan praktik kerja paksa, khususnya di wilayah Xinjiang. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak hanya menyampaikan kritik melalui diplomasi, tetapi juga menerapkan sanksi kepada para pejabat Tiongkok dan menerapkan sanksi ekonomi serta blokade dagang terhadap produk-produk yang diduga terkait praktik kerja paksa yang membuat PDB Tiongkok menurun pada tahun 2022. Ketiga, kondisi ekonomi dan militer Tiongkok. Pada penelitian penelitian ini penulis tidak membahas terkait faktor militer dikarenakan belum ada data yang menunjukkan bahwa keputusan Tiongkok meratifikasi konvensi ini untuk memperbaiki atau memperkuat militer dalam negeri Tiongkok. Penulis fokus pada kondisi ekonomi dimana Tiongkok memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan dagang dan mempertahankan kepercayaan mitra internasional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dibahas menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Dr. Tuti Khairani Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian Kualitatif*", penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan mengkaji permasalahan dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu dan fenomena sosial yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Proses penelitian ini melibatkan perumusan pertanyaan yang relevan dengan topik yang dibahas, perancangan prosedur yang tepat, pengumpulan data melalui berbagai metode (seperti wawancara, dokumentasi, atau studi kasus), menganalisis data secara induktif, serta menafsirkan semua data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan Tiongkok dalam meratifikasi *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022 dan mendalami alasan-alasan yang mendorong negara tersebut untuk mengambil langkah tersebut dalam konteks domestik dan internasional.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai aktor utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk meratifikasi *Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022. Objek yang diteliti adalah keputusan Tiongkok untuk meratifikasi konvensi

tersebut, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, baik dari perspektif domestik maupun internasional.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data sekunder adalah metode penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber-sumber tersebut mencakup penelitian terdahulu, dokumen resmi, laporan pemerintah, publikasi organisasi, buku, jurnal ilmiah, laporan media, berita, serta situs *web* resmi milik pemerintah. Data yang dikumpulkan akan berfokus pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis memulai dengan mengidentifikasi suatu masalah. Setelah itu, masalah yang teridentifikasi dikembangkan menjadi suatu isu yang lebih spesifik. Setelah isu yang lebih dispesifikkan, penulis mencoba mencari buku ataupun jurnal-jurnal yang berkorelasi dengan topik yang ada. Lalu penulis mencoba untuk menetapkan tujuan utama di penelitiannya. Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, penulis melakukan analisis dalam bentuk teks. Data yang sudah dikumpulkan akan diklasifikasi menjadi ide utama. Lalu tahap terakhir, penulis melakukan laporan yang bersifat deskriptif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Pada **BAB 1**, penulis menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang diangkat, memaparkan rumusan masalah yang diangkat, menyebutkan tujuan dari penelitian, meninjau penelitian berdasarkan beberapa sumber pustaka dan kerangka pemikiran, menguraikan metode penelitian yang digunakan, dan diakhiri dengan penjelasan terkait sistematika pembahasan.

Pada **BAB 2**, penulis akan membahas determinan politik dalam negeri yang memengaruhi keputusan Tiongkok meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022.

Pada **BAB 3**, penulis akan membahas determinan kondisi ekonomi serta determinan konteks internasional yang memengaruhi keputusan Tiongkok meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022.

Pada **BAB 4**, penulis akan menjelaskan tentang ringkasan dan kesimpulan akhir dari pembahasan sampai analisis yang telah disajikan mulai dari bab 1 sampai bab 3, sekaligus memberikan saran atau rekomendasi bagi penelitian-penelitian lain ke depannya di masa yang akan datang.

BAB 2

POLITIK DALAM NEGERI TIONGKOK DALAM MERATIFIKASI *FORCED LABOUR CONVENTION 1930 (NO.29) ILO* PADA TAHUN 2022

Dalam bab ini, penulis menganalisis determinan politik dalam negeri (politik domestik) dari teori pengambilan keputusan William D. Coplin. Menurut William D. Coplin dalam bukunya “*Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*” menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dapat dipahami melalui kondisi dan struktur politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah seluruh dinamika internal suatu negara yang mencakup sistem pemerintahan, lembaga-lembaga politik, partai politik, kelompok kepentingan, dan opini publik yang turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri (Coplin 2003).

2.1 *Bureaucratic Influencers*

Dalam teori *Decision Making* yang dikemukakan oleh William D. Coplin, *bureaucratic influencers* merupakan bagian penting dari aktor domestik yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri sebuah negara (Coplin 2003). Coplin menjelaskan bahwa individu atau institusi dalam lingkup eksekutif, seperti kementerian, lembaga administratif, dan badan pelaksana kebijakan, berperan dalam menyediakan informasi, merancang opsi kebijakan, dan menjalankan keputusan yang telah ditetapkan oleh elite politik. Di negara Tiongkok, birokrasi memainkan peran strategis dalam proses pengambilan keputusan yang sangat terpusat di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT), khususnya di bawah kekuasaan Xi Jinping sebagai pemimpin negara Tiongkok.

Tiongkok merupakan negara dengan sistem pemerintahan satu partai yang sangat terpusat, di mana struktur birokrasi negara bukan hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai alat legitimasi dan kontrol sosial (Laksono and Devina 2023). Birokrasi di Tiongkok tidak bersifat independen dari politik tapi sebaliknya, birokrasi merupakan perpanjangan tangan dari partai penguasa. Dalam proses pengambilan keputusan untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022, peran birokrasi sangat penting baik dalam tahap persiapan, analisis implikasi, maupun implementasi teknis ratifikasi. Beberapa lembaga yang terlibat langsung antara lain adalah Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial (MoHRSS), Komite Urusan Luar Negeri di bawah Dewan Negara, dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC).

Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (*Ministry of Foreign Affairs of the PRC*) bertanggung jawab langsung dalam membangun komunikasi internasional dan menjadi juru bicara negara dalam forum-forum global, termasuk di ILO. Kementerian bertugas menyusun diplomasi yang sesuai dengan arah kebijakan partai, serta berfungsi menjelaskan keputusan Tiongkok kepada masyarakat internasional. Pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada tanggal 21 April 2022 bahwa ratifikasi konvensi ini disebut sebagai bukti komitmen Tiongkok terhadap perlindungan hak-hak buruh dan kerja sama internasional yang bernilai positif (Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China 2022).

Di sisi lain, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial bertugas untuk menyelaraskan kebijakan tenaga kerja domestik dengan standar internasional. Lembaga ini bertugas melakukan harmonisasi antara peraturan perburuhan Tiongkok dengan standar-standar ILO, serta menyusun rencana implementasi kebijakan pasca-ratifikasi mengingat masih banyak sektor di Tiongkok yang menghadapi kritik terkait kondisi kerja yang buruk, seperti jam kerja yang panjang, gaji rendah, hingga dugaan kerja paksa, terutama di wilayah seperti Xinjiang.

Selain itu, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), sebagai lembaga perencana utama ekonomi Tiongkok, memiliki peran dalam menilai dampak ekonomi dari kebijakan. Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang seperti dalam Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–2025), NDRC melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi dengan standar internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan berkualitas tinggi (*high-quality development*). Ratifikasi Konvensi ILO No.29 merupakan langkah strategis di mana NDRC melihat bahwa dengan adanya penguatan regulasi ketenagakerjaan dapat meningkatkan daya tarik investasi asing dan memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap produk buatan Tiongkok.

Keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930* (No.29) ILO tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang terpusat di bawah Xi Jinping. Sebagai Presiden, Sekretaris Jenderal PKT, dan Ketua Komisi Militer Pusat, Xi Jinping memiliki otoritas penuh terhadap arah kebijakan domestik maupun luar negeri. Kepemimpinan Xi Jinping yang kuat menjadikan

birokrasi sebagai alat pelaksana visi politiknya. Ratifikasi Konvensi No.29 dilakukan sebagai upaya politik untuk memperkuat legitimasi negara di mata internasional tanpa mengubah secara radikal struktur otoritarianisme domestik.

Keputusan Tiongkok meratifikasi konvensi ILO No.29 memperlihatkan bagaimana birokrasi Tiongkok bekerja dalam kerangka *taktis* dan *top-down*. Arahan datang dari pimpinan partai, kemudian diterjemahkan menjadi rencana kerja oleh kementerian-kementerian teknis, hingga akhirnya dikomunikasikan secara global sebagai wujud komitmen terhadap standar internasional. Proses ratifikasi tidak diiringi dengan reformasi menyeluruh terhadap sistem ketenagakerjaan, tetapi lebih pada penyesuaian naratif yang disesuaikan dengan diplomasi global. Proses ini menggambarkan bahwa birokrasi di Tiongkok memiliki karakter yang fungsional dan tidak berdasarkan hasil diskusi bersama maupun hasil keputusan bersama. Birokrasi tidak mendebat arah kebijakan, tetapi hanya bertugas menerjemahkan dan melaksanakan kehendak politik.

Dalam teori pengambilan keputusan William D. Coplin, peran birokrasi Tiongkok dalam kasus ini adalah sebagai alat. Mereka tidak membentuk arah kebijakan secara independen, tetapi memiliki fungsi penting dalam membangun *policy tools*, menyusun regulasi teknis, serta menjadi “wajah publik” dari keputusan yang sudah diambil oleh elite politik. Meskipun keputusan ratifikasi merupakan produk politik tingkat tinggi, implementasinya sepenuhnya bertumpu pada kapasitas birokrasi nasional untuk menyusun peraturan pelaksana, melakukan pelatihan tenaga kerja, serta mengawasi kepatuhan sektor industri terhadap standar ketenagakerjaan baru.

Birokrasi Tiongkok juga berperan dalam pengendalian informasi dan propaganda terkait kebijakan ini. Melalui lembaga-lembaga seperti Kantor Informasi Dewan Negara (*State Council Information Office*) dan media yang dikendalikan negara seperti Xinhua News dan Global Times, narasi tentang ratifikasi konvensi disusun secara sistematis untuk menegaskan citra Tiongkok sebagai negara yang bertanggung jawab secara sosial. Narasi ini tidak hanya ditujukan kepada audiens internasional, tetapi juga kepada masyarakat domestik sebagai bagian dari strategi legitimasi internal. *Amnesty International* telah mengumpulkan bukti yang kuat bahwa pemerintah Tiongkok diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Xinjiang (*Amnesty Internasional* 2022). Dugaan pelanggaran tersebut mencakup penahanan massal, pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang, penyiksaan, serta tindakan represif lainnya yang ditujukan kepada kelompok etnis mayoritas Muslim, khususnya etnis Uyghur, meskipun konvensi telah diratifikasi. Hal ini menimbulkan dilema antara narasi komitmen internasional dan realitas implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, birokrasi menghadapi tantangan serius dimana Tiongkok harus menjalankan kebijakan yang terlihat sesuai dengan hukum internasional, tetapi dalam kerangka politik domestik yang sangat tertutup dan represif.

2.2 Partisan Influencers

Dalam teori *Decision Making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin, *partisan influencers* merupakan salah satu dari empat kategori aktor domestik yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin menjelaskan bahwa partai politik merupakan sarana distribusi kekuasaan, saluran

penting dalam merespons tekanan publik, menyalurkan aspirasi elite, serta menciptakan konsensus atas kebijakan tertentu (Coplin 2003).

Tiongkok merupakan negara dengan sistem politik yang sangat terpusat, di mana Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai kekuatan partai tunggal yang memegang kendali penuh atas seluruh kebijakan negara dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pemerintahan (Wati, Wati, and Hanifa 2023). Meskipun secara formal terdapat delapan partai politik lainnya yang tergabung dalam Front Persatuan Tiongkok, yaitu Komite Revolusioner Kuomintang Tiongkok (RCCK), Liga Demokratik Tiongkok (CDL), Asosiasi Konstruksi Demokratik Tiongkok (CAPD), Asosiasi China untuk Promosi Demokrasi (CPDA), Partai Petani dan Buruh Tiongkok (CNDLP), Partai Zhi Gong Tiongkok (CZGP), Masyarakat Jiusan (JSP), dan Liga Otonomi Demokratik Taiwan (TADL), namun partai-partai ini tidak memiliki kekuatan independen dalam pemerintahan. Partai-partai tersebut berfungsi sebagai bagian dari sistem politik konsultatif di bawah kepemimpinan PKT, yang berarti bahwa keputusan politik tetap berada di tangan PKT sebagai partai tunggal yang mendominasi struktur negara dan mengendalikan seluruh aspek pemerintahan, ekonomi, serta kebijakan dalam dan luar negeri. Tidak adanya oposisi yang kuat membuat keputusan kebijakan bersifat *top-down*.

Sejak naiknya Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal PKT pada tahun 2012, terjadi perubahan signifikan dalam struktur internal partai. Xi Jinping melakukan sentralisasi kekuasaan berupa penghapusan batas masa jabatan

presiden pada tahun 2018, dan memusatkan kendali politik langsung terhadap lembaga-lembaga negara, tentara, serta aparat hukum.

Keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930* (No.29) pada tahun 2022 memunculkan dinamika di dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT). Dalam struktur partai, terdapat perbedaan pandangan di antara kelompok elite. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendorong keterbukaan terhadap dunia internasional, seperti kalangan teknokrat, ekonom, dan pejabat daerah dari wilayah pesisir yang lebih terintegrasi dengan pasar global. Kelompok ini melihat bahwa kerja sama internasional dan komitmen terhadap standar global, termasuk isu ketenagakerjaan, dapat meningkatkan kredibilitas dan posisi Tiongkok di mata dunia.

Di sisi lain, terdapat kelompok yang lebih konservatif dan nasionalis, seperti militer, aparat keamanan, serta tokoh-tokoh partai yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Xi Jinping. Kelompok ini cenderung memprioritaskan kedaulatan negara dan stabilitas politik dalam negeri, serta lebih skeptis terhadap tekanan asing, terutama dalam isu-isu sensitif seperti Xinjiang dan HAM.

Meskipun PKT memiliki kendali penuh terhadap arah kebijakan negara, mereka tetap dihadapkan pada tekanan dari sektor industri dan masyarakat yang mulai menuntut peningkatan perlindungan tenaga kerja. PKT menyadari bahwa perbaikan di sektor ketenagakerjaan penting untuk dilakukan demi menjaga stabilitas domestik dan merupakan langkah strategi ekonomi jangka panjang. Dengan menunjukkan komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional, Tiongkok berharap dapat memperkuat daya saing di pasar global dan menarik

kembali investasi asing yang sempat menurun akibat sorotan internasional terhadap isu kerja paksa.

Selain menjadi pengambil keputusan utama, PKT juga berperan besar dalam mengarahkan diskursus publik terkait ratifikasi *Forced Labour Convention No.29*. Melalui media resmi seperti *Xinhua*, *People's Daily*, dan *Global Times*, PKT membingkai ratifikasi ini bukan sebagai respon terhadap tekanan asing, tetapi sebagai bagian dari reformasi internal menuju sistem ketenagakerjaan yang lebih modern dan adil.

Diskursus ini dirancang berkaitan langsung dengan agenda “Pembangunan Berkualitas Tinggi” dalam Rencana Lima Tahun ke-14. Dengan membingkai ratifikasi sebagai langkah sukarela dan bertanggung jawab dimana PKT berusaha mengendalikan opini publik, meredam kritik internasional, dan menunjukkan bahwa Tiongkok tetap berdaulat atas kebijakan dalam negerinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelompok progresif dan konservatif di internal partai.

Di saat yang sama, PKT tidak bisa mengabaikan tekanan eksternal yang semakin besar, khususnya terkait dugaan kerja paksa di Xinjiang. Sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap produk asal wilayah tersebut memberikan dampak langsung terhadap ekspor dan sektor industri tertentu. Karena itu, PKT harus mengambil langkah-langkah strategis, termasuk ratifikasi konvensi ILO, untuk memitigasi risiko ekonomi dan menjaga reputasi internasional Tiongkok di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Keputusan untuk meratifikasi konvensi ILO bukan hanya respons terhadap tekanan eksternal, tetapi juga upaya untuk mempertahankan stabilitas domestik dan melindungi kekuasaan politik PKT. Keberhasilan PKT dalam mengontrol media dan organisasi sosial, serta mendominasi ruang publik, memberikan keleluasaan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan diplomatik internasional tanpa merusak kekuasaan internal. Pada tahun 2020, Tiongkok menghadapi protes besar-besaran di Hong Kong terkait dengan RUU Keamanan Nasional. Meskipun menghadapi tekanan internasional, pemerintah berhasil mempertahankan kontrol dengan menggunakan kekuatan militer dan kebijakan represif. Ini menunjukkan bagaimana politik domestik, yang dikuasai oleh PKT, sangat memengaruhi kebijakan luar negeri, termasuk keputusan untuk meratifikasi konvensi internasional yang melibatkan isu hak buruh.

Sebelumnya, terdapat beberapa kebijakan mengenai tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) mempertahankan hegemoni dengan menampilkan dirinya sebagai pelindung hak rakyat. Adapun kebijakan sebagai berikut:

Tabel 1. Kebijakan Terkait Tenaga Kerja di Tiongkok

Tahun	Kebijakan
2008	Undang-Undang Kontrak Kerja (<i>Labour Contract Law</i>)
2013	Penghapusan Sistem “Laojiao”
2022	Ratifikasi Konvensi ILO No.29

Sumber: Wang et al. (2019); Macbean (2022); ILO (2022)

Salah satu tonggak adalah pengesahan Undang-Undang Kontrak Kerja (Labour Contract Law) pada tahun 2008, yang mewajibkan pemberi kerja untuk membuat kontrak tertulis dan menjamin hak-hak dasar pekerja (Gallagher 2017). Reformasi ini mengurangi kerja informal dan memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja. Selanjutnya, penghapusan Laojiao pada 2013, sistem penahanan administratif tanpa proses hukum, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk merespons kritik atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk terhadap buruh migran (Human Rights Watch 2013).

PKT, sebagai partai yang memegang kendali penuh dalam politik domestik Tiongkok, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri dan internasional negara. Keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* ILO pada tahun 2022 dapat dianalisis dalam konteks politik domestik negara tersebut. Salah satu alasan keputusan ini dibuat adalah untuk merespons tekanan internasional terkait isu hak asasi manusia, khususnya yang berhubungan dengan pekerja paksa di wilayah Xinjiang (International Labour Organization 2022). Meskipun PKT mengontrol ketat kebijakan dalam negeri, keputusan ini menunjukkan upaya mereka untuk beradaptasi dengan norma internasional sambil mempertahankan citra positif Tiongkok di mata dunia.

Keputusan meratifikasi konvensi ini juga berkaitan dengan bagaimana PKT mengelola citra internasionalnya untuk memperkuat legitimasi internalnya. Pada saat yang sama, kebijakan ini dapat dimaknai sebagai strategi untuk menanggapi kritik dari negara-negara Barat, yang terus mendesak Tiongkok untuk memperbaiki standar hak pekerja dan bekerja sama dengan lembaga internasional (South China Morning Post 2021). Namun, meskipun konvensi ini diratifikasi,

implementasinya tetap berada di bawah pengawasan ketat PKT, yang cenderung mengendalikan segala bentuk protes atau perlawanan domestik terkait isu pekerja (South China Morning Post 2021). Oleh karena itu, keputusan ini mencerminkan upaya PKT untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi tekanan eksternal dan mempertahankan stabilitas politik domestik, sesuai dengan prinsip dasar mereka dalam mengelola negara.

2.3 Interest Influencers

Menurut William D. Coplin dalam teori *Decision Making*-nya, *interest influencers* adalah kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan ekonomi, sosial, atau politik, dan berupaya memengaruhi kebijakan luar negeri melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok ini dapat berupa organisasi bisnis, komunitas industri, serikat buruh, asosiasi profesional, lembaga pendidikan, maupun kelompok agama. Dalam sistem demokrasi, kelompok ini memiliki saluran formal untuk menyampaikan aspirasinya, seperti lobi, petisi, atau kerja sama dengan parlemen. Namun, dalam sistem politik otoriter seperti di Tiongkok, *interest influencers* tidak memiliki kebebasan serupa, meskipun eksistensi dan pengaruh mereka tetap signifikan.

Tiongkok dengan sistem satu partai dan memiliki struktur ekonomi yang campuran, membentuk dinamika kelompok kepentingan yang cukup khas dibanding negara lain. Di satu sisi, struktur ekonomi pasar memungkinkan terbentuknya berbagai kelompok industri dan asosiasi bisnis yang memiliki kepentingan besar dalam kebijakan luar negeri, terutama dalam hal perdagangan, investasi, dan regulasi tenaga kerja. Di sisi lain, sistem politik otoriter membatasi

kemampuan kelompok ini untuk mengartikulasikan kepentingan mereka secara independen dari negara. Meskipun demikian, konsultasi internal, dan jaringan relasi dengan elite politik, kelompok-kelompok kepentingan tetap mampu memengaruhi arah kebijakan tertentu, termasuk keputusan Tiongkok dalam meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* pada tahun 2022.

Salah satu kelompok kepentingan utama adalah komunitas industri ekspor. Tiongkok merupakan negara dengan nilai ekspor terbesar di dunia, dan banyak perusahaan besar di sektor tekstil, manufaktur, elektronik, dan pertambangan sangat bergantung pada akses ke pasar global. Dengan meningkatnya tekanan dari negara-negara Barat mengenai dugaan praktik kerja paksa, terutama di wilayah Xinjiang, banyak perusahaan Tiongkok yang mengalami hambatan perdagangan, pembatalan kontrak, pemutusan kerja sama, hingga pembatasan impor melalui regulasi seperti *Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA)* yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2021.

Kelompok industri yang terkena dampak langsung dari sanksi ini memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna memulihkan reputasi dagang Tiongkok. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah meratifikasi Konvensi ILO No.29 sebagai bentuk sinyal komitmen terhadap standar ketenagakerjaan internasional. Dalam hal ini, kelompok industri berperan sebagai *interest influencers* yang mendorong keputusan tersebut karena menyadari bahwa citra internasional negara akan berdampak langsung pada kelangsungan bisnis mereka.

Selain sektor industri, kelompok pengusaha swasta juga merupakan aktor yang memengaruhi keputusan ini. Meskipun banyak perusahaan besar Tiongkok adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peran perusahaan swasta semakin besar dalam perekonomian nasional. Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Alibaba, Huawei, Tencent, dan JD.com memiliki pengaruh ekonomi yang luas serta jaringan global yang kuat. Mereka memiliki tugas untuk menjaga hubungan baik dengan pasar internasional dan investor global. Bagi mereka, ratifikasi konvensi internasional menjadi langkah strategis untuk menghindari label “eksportir kerja paksa” yang merugikan citra perusahaan dan menurunkan nilai saham.

Perlu dicatat bahwa tekanan dari kelompok kepentingan ekonomi ini biasanya disalurkan melalui jalur non-formal, seperti melalui anggota Partai Komunis Tiongkok yang memiliki relasi dekat dengan sektor bisnis, atau melalui asosiasi industri yang memiliki akses terhadap Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional. Di Tiongkok, hubungan antara bisnis dan negara sangat erat, terutama karena banyak elite bisnis juga merupakan anggota partai atau memiliki koneksi keluarga dengan elite partai. Oleh karena itu, walaupun tidak menyuarakan aspirasi secara terbuka, kelompok ini tetap memiliki saluran yang kuat untuk memengaruhi keputusan.

Kelompok kepentingan lainnya yang relevan adalah investor dan mitra dagang asing. Banyak perusahaan multinasional dari Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang yang memiliki fasilitas produksi di Tiongkok atau menjadikan negara tersebut sebagai bagian penting dari rantai pasokan global mereka. Ketika isu

kerja paksa mencuat, perusahaan-perusahaan ini menghadapi tekanan dari publik dan pemerintah negara asal mereka untuk memutuskan hubungan bisnis dengan mitra yang terlibat dalam praktik pelanggaran HAM. Akibatnya, investor asing mulai menuntut pemerintah Tiongkok untuk menunjukkan langkah konkret dalam reformasi ketenagakerjaan.

Dalam banyak kasus, investor dan perusahaan asing meminta adanya audit independen terhadap fasilitas produksi di Tiongkok serta kepatuhan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Ratifikasi Konvensi No.29 menjadi salah satu syarat simbolik untuk membangun kembali kepercayaan investor global. Hal ini sejalan dengan laporan dari *International Labour Organization* yang menyebutkan bahwa keanggotaan dan ratifikasi konvensi dapat memperkuat iklim investasi dan meningkatkan reputasi suatu negara di pasar internasional (ILO, 2022).

Di sektor domestik, serikat buruh yang beroperasi di bawah kendali pemerintah juga menjadi bagian dari interest influencers. Meskipun tidak independen seperti serikat di negara demokratis, organisasi seperti All-China Federation of Trade Unions (ACFTU) tetap berfungsi sebagai penghubung antara buruh dan pemerintah. Laporan dari China Labour Bulletin (2023) menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi kerja di kalangan buruh meningkat tajam pasca-pandemi, terutama di sektor jasa dan manufaktur. Banyak pekerja mengeluhkan jam kerja panjang, upah yang tidak mencukupi, serta kurangnya perlindungan hukum. Dalam kondisi ini, tekanan dari buruh, meskipun tidak

langsung dan sering direpresi, tetap menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pembuat kebijakan.

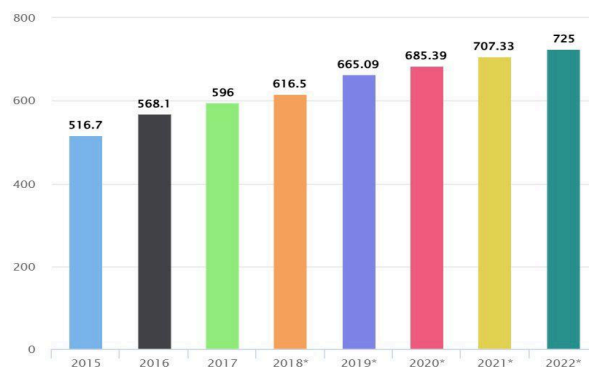
Di sisi lain, laporan dari Human Rights Watch, *Amnesty International*, dan BBC mengenai kondisi di Xinjiang, misalnya, mendorong munculnya jaringan kepentingan global yang menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk Tiongkok. Meskipun kelompok ini tidak memiliki akses langsung ke struktur pengambilan kebijakan Tiongkok, tekanan moral dan reputasional yang mereka ciptakan mampu memengaruhi persepsi investor, mitra dagang, dan bahkan kelompok elite di dalam negeri. Keputusan untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* pada tahun 2022 merupakan bentuk kompromi antara keinginan menjaga kedaulatan domestik dan kebutuhan menjaga hubungan ekonomi global.

2.4 Mass Influencers

Dalam teori *Decision Making* yang dikembangkan oleh William D. Coplin, opini publik atau *mass influencers* merujuk pada elemen-elemen masyarakat umum yang, secara kolektif, memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara mencakup rakyat biasa, media massa, tokoh masyarakat, akademisi, hingga pengguna media sosial. Dalam sistem demokrasi, opini publik biasanya disalurkan melalui pemilu, jajak pendapat, aksi unjuk rasa, atau media bebas. Namun, dalam negara otoriter seperti Tiongkok, peran opini publik bersifat lebih kompleks karena ruang kebebasan berpendapat sangat terbatas, dan negara memiliki kontrol penuh terhadap informasi dan media (Coplin 2003).

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial di Tiongkok telah meningkat pesat. Menurut data yang diterbitkan oleh *China Internet Network Information Center* (CNNIC) pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Tiongkok mencapai 725 juta orang, dengan sekitar 1,02 miliar diantaranya menggunakan media sosial secara aktif (China Internet Network Information Center 2022). Sebagian besar dari mereka aktif menggunakan platform seperti WeChat, Weibo, Douyin, dan Zhihu. Media sosial ini menjadi arena ekspresi baru bagi warga, terutama generasi muda, untuk menyuarakan keresahan sosial, kritik terhadap ketimpangan ekonomi, dan solidaritas atas isu-isu keadilan, termasuk terkait kondisi pekerja. Ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi platform penting untuk membentuk opini publik di negara tersebut.

Gambar 2 Jumlah Pengguna Media Sosial di Tiongkok Tahun 2018-2022



Sumber: StatInvestor (2025)

Meskipun demikian, penggunaan media sosial ini tetap dalam pengawasan ketat pemerintah, yang mengontrol narasi yang berkembang dan menghapus konten-konten yang dianggap merugikan atau mengancam stabilitas politik.

Opini publik di Tiongkok dalam menentukan kebijakan dapat dilihat dari cara pemerintah merespons kritik internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan pekerja paksa di wilayah Xinjiang. Dalam

beberapa tahun terakhir, isu pekerja paksa di Xinjiang menjadi sorotan internasional, yang semakin diperbincangkan di platform-platform sosial Tiongkok seperti Weibo. Meskipun ada pembatasan terhadap kebebasan berbicara, percakapan terkait isu ini semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar informasi dari luar negeri (Silver, Devlin, and Huang 2020)

Dalam era pasca-reformasi, ketidakpuasan terhadap perlakuan buruk di tempat kerja, gaji rendah, serta jam kerja panjang memicu semakin besarnya tuntutan perlindungan hukum. Menurut survei China Labour Bulletin (2023), lebih dari 68% pekerja migran menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja mereka, dan mendukung intervensi hukum yang lebih kuat. Ketidakpuasan ini tidak hanya tersalurkan melalui mekanisme formal seperti petisi ke pemerintah daerah, tetapi juga melalui media sosial. Dalam konteks Tiongkok, Weibo dan WeChat menjadi dua platform utama yang digunakan masyarakat untuk mengungkapkan kritik terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Adapun bukti konkret ketidakpuasan publik melalui media sosial sebagai berikut:

1. Gerakan "996.ICU" (2019)

Gerakan ini mengkritik budaya kerja berlebihan "996" (bekerja 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu) di sektor teknologi. Platform GitHub menjadi ruang global untuk meluapkan protes, dan di Weibo, tagar #996工作制 (sistem kerja 996) sempat menjadi tren sebelum akhirnya disensor.

2. Protes Pekerja Pengiriman Barang (2021)

Ribuan kurir dari perusahaan pengiriman seperti Meituan dan Ele.me menggunakan Weibo untuk mengeluhkan gaji rendah dan risiko kecelakaan kerja, dengan kampanye seperti #RidersLivesMatter.

Apabila dikaitkan dengan keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No. 29)* ILO, banyak warganet yang mengungkapkan pandangannya tentang ratifikasi tersebut melalui media sosial. Beberapa pengguna Weibo mendukung keputusan ini sebagai langkah positif bagi Tiongkok untuk menunjukkan bahwa mereka siap beradaptasi dengan standar internasional. Namun, ada juga kelompok yang meragukan implementasi sebenarnya, mengingat kontrol ketat terhadap kebijakan domestik oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Meskipun demikian, keputusan untuk meratifikasi konvensi ini tetap mencerminkan upaya pemerintah untuk menanggapi tekanan dari opini publik internasional, yang terus mendesak Tiongkok untuk meningkatkan perlindungan hak pekerja, terutama dalam konteks pekerja paksa di Xinjiang (South China Morning Post 2021).

Meskipun banyak warganet yang membahas isu kerja paksa di media sosial, banyak juga yang merasa tertekan untuk tidak mengungkapkan pandangan mereka yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Seiring dengan meningkatnya pemantauan terhadap konten-konten di media sosial, pemerintah Tiongkok terus menghapus unggahan yang dianggap sensitif atau merugikan citra negara (China Daily 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara, kontrol yang ketat tetap membatasi kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, meskipun opini publik domestik di Tiongkok sering kali dibentuk oleh informasi yang dikendalikan oleh pemerintah, penggunaan media sosial memberikan wawasan mengenai pandangan masyarakat terhadap isu-isu internasional, termasuk hak pekerja dan pekerja paksa. Meskipun ada perbedaan pandangan, pemerintah Tiongkok tetap berusaha menjaga citra positif mereka di mata dunia internasional, sembari mengontrol narasi domestik yang dapat mengancam stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan Partai Komunis Tiongkok.

BAB 3

KONDISI EKONOMI DAN KONTEKS INTERNASIONAL TIONGKOK DALAM MERATIFIKASI *FORCED LABOUR CONVENTION 1930 (NO.29)* *ILO* PADA TAHUN 2022

Keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022 tidak dapat dilepaskan dari dinamika kondisi internal dan eksternal yang dihadapi negara tersebut. Selain faktor politik domestik, determinan kondisi ekonomi dan lingkup internasional juga memainkan peran penting dalam mendorong kebijakan tersebut. Pada bab ini penulis akan membahas dua determinan utama dari teori pengambilan keputusan William D. Coplin, yaitu kondisi ekonomi nasional serta konteks internasional yang meliputi geopolitik Tiongkok, faktor ekonomi internasional, dan faktor politik internasional.

3.1 Kondisi Ekonomi Tiongkok

Dalam kerangka teori pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh William D. Coplin, determinan kondisi ekonomi merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri sebuah negara (Coplin 2003). Coplin menjelaskan bahwa sumber daya ekonomi, tingkat ketergantungan terhadap pasar luar negeri, struktur produksi, dan hubungan dagang internasional semuanya menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis, termasuk keputusan untuk meratifikasi perjanjian atau konvensi internasional.

Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (World Bank 2024). Kondisi perekonomian

Tiongkok dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB), *Gross National Income* (GNI), dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Produk Domestik Bruto (GDP) menggambarkan keseluruhan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu tahun. Sementara itu, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) mencerminkan total pendapatan yang diperoleh oleh warga negara, baik dari aktivitas ekonomi di dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun *Foreign Direct Investment* (FDI) merepresentasikan jumlah investasi langsung dari luar negeri yang masuk dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi nasional. Berikut Tabel Performa GDP, GNI, FDI Tiongkok dalam 5 tahun (2018-2022):

Tabel 2. Performa GDP, GNI, FDI dan Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Periode 2018-2022

Tahun	GDP (Rp Triliun)	GNI (Rp Triliun)	FDI (Rp Triliun)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	13,75	14,09	235,37	6,6
2019	14,58	14,52	187,17	6,0
2020	14,92	14,88	253,10	2,2
2021	16,2	18,08	344,07	8,1
2022	16.71	18,16	190,20	3,0

Sumber : World Bank (2022); CEIC Data (2023)

Menurut laporan World Bank tahun 2022 terlihat bahwa PDB Tiongkok meningkat secara konsisten, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 akibat tekanan global seperti pandemi dan krisis geopolitik. Di sisi lain, GNI Tiongkok menunjukkan peningkatan yang stabil, yang menandakan bahwa

pendapatan warganya baik dari dalam maupun luar negeri terus tumbuh. Hal ini menguatkan posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Adapun arus masuk FDI juga menunjukkan dinamika yang menarik. Tahun 2021 merupakan puncak tertinggi arus FDI, mencapai USD 344,1 miliar. Namun pada tahun 2022, FDI menurun cukup signifikan menjadi USD 190,2 miliar, yang sebagian besar disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan tekanan geopolitik dari negara-negara Barat, termasuk sanksi dan investigasi terhadap dugaan kerja paksa di wilayah Xinjiang. Penurunan FDI bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah Tiongkok untuk memperbaiki citra internasionalnya dengan cara meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan buruh.

Ketergantungan ekonomi Tiongkok terhadap sektor ekspor juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan kebijakan luar negeri. Aktivitas ekspor berkontribusi sekitar 18–20% terhadap PDB nasional, mencerminkan posisi ekonomi Tiongkok yang sangat terbuka dan terintegrasi dengan pasar global. Dalam kondisi ini, tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kerja paksa di wilayah Xinjiang, memiliki dampak langsung terhadap relasi dagang Tiongkok, khususnya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penerapan kebijakan seperti *Uyghur Forced Labor Prevention Act* (UFLPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 2022 yang melarang masuknya produk dari Xinjiang tanpa bukti bebas kerja paksa memperburuk ketegangan dagang dan menurunkan kepercayaan mitra dagang internasional terhadap produk asal Tiongkok.

Wilayah Xinjiang memiliki peran strategis dalam rantai pasok global Tiongkok. Wilayah Xinjiang menyumbang lebih dari 20% produksi kapas nasional dan merupakan pusat produksi utama *polysilicon*, bahan penting untuk industri panel surya dan teknologi energi terbarukan (Li, Wang, and Lu 2022). Meningkatnya kebutuhan global terhadap energi hijau, tekanan terhadap Xinjiang berdampak luas tidak hanya pada sektor tekstil tetapi juga sektor energi. Oleh karena itu, meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO sebagai upaya strategis untuk melindungi kelangsungan aktivitas ekspor dan impor sekaligus menjawab tekanan internasional tanpa harus secara eksplisit mengakui tuduhan pelanggaran.

3.2 Konteks Internasional

Konteks internasional merupakan salah satu determinan penting dalam proses pengambilan keputusan suatu negara. Konteks internasional mencakup faktor geopolitik, dinamika ekonomi global, dan interaksi politik internasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepentingan nasional. Menurut William D. Coplin, Setiap negara tidak dapat membuat keputusan luar negeri secara sepihak tanpa terlebih dahulu memperhitungkan dinamika global yang kompleks, karena tekanan dan peluang dari tatanan internasional seringkali menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan strategis (Coplin 2003). Dalam konteks ratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* oleh Tiongkok pada tahun 2022, ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dari Tiongkok dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.

3.2.1 Faktor Geopolitik

Menurut teori pengambilan keputusan William D. Coplin, aspek geopolitik mencerminkan bagaimana posisi geografis suatu negara serta kekuatan strategisnya di tingkat global dapat memengaruhi arah kebijakan luar negeri. Geopolitik tidak hanya mencakup batas wilayah secara fisik, melainkan juga mencerminkan cara negara merespons tekanan serta memanfaatkan peluang yang timbul dari persaingan antaraktor global (Coplin, 2003).

Secara geografis, Tiongkok memiliki wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan 14 negara, termasuk kekuatan strategis di Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Posisi ini menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan pengaruh besar dalam dinamika kawasan. Letaknya yang strategis tidak hanya penting dalam hal pertahanan dan keamanan nasional, tetapi juga menjadi faktor penting dalam integrasi ekonomi dan perdagangan internasional. Wilayah Xinjiang, yang terletak di bagian barat laut Tiongkok, berbatasan langsung dengan delapan negara, termasuk Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, dan Afghanistan. Posisi geografis Xinjiang menjadikannya gerbang utama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur global Belt and Road Initiative (BRI), menghubungkan Tiongkok dengan jalur perdagangan darat ke Asia Tengah hingga Eropa. Namun, wilayah Xinjiang menjadi sorotan dunia internasional karena tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur, termasuk praktik kerja paksa yang terorganisir.

Amerika Serikat secara aktif menuduh Tiongkok melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur dan menyebutnya sebagai bentuk genosida modern

(American Journal of International Law 2022). Sebagai respon, pada maret 2021 Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat tinggi Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Sanksi ini termasuk pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu-individu yang dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Berikut daftar nama pejabat Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang:

Tabel 3. Daftar Nama Pejabat Tiongkok Yang Menerima Sanksi dari Uni Eropa

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Kasus
1.	Zhu Hailun	Mantan Sekretaris Komite Urusan Politik dan Hukum Xinjiang, mantan Wakil Sekretaris Komite Partai Xinjiang, dan mantan Wakil Ketua Kongres Rakyat ke-13 Xinjiang, badan legislatif regional.	Mantan Sekretaris Komite Urusan Politik dan Hukum Xinjiang, mantan Wakil Sekretaris Komite Partai Xinjiang, dan mantan Wakil Ketua Kongres Rakyat ke-13 Xinjiang, badan legislatif regional.
2.	Wang Junzheng	Sekretaris Partai di Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) dan Wakil Sekretaris Komite Partai Xinjiang	Bertanggung jawab atas XPCC, lembaga paramiliter yang terlibat dalam pengelolaan penahanan massal, kerja paksa, dan represi budaya terhadap etnis Uighur. Terlibat dalam pelanggaran serius terhadap kebebasan beragama, budaya, dan hak asasi manusia.

3.	Wang Mingshan	Anggota Komite Tetap Partai di Xinjiang, Sekretaris Komite Urusan Politik dan Hukum Xinjiang, serta mantan Direktur dan Wakil Sekretaris Partai dari Biro Keamanan Publik Xinjiang.	Memegang peranan tinggi dalam sistem penegakan hukum dan keamanan di Xinjiang, termasuk pengawasan aparat kepolisian dan sistem penahanan massal. Terlibat dalam kebijakan pengendalian sosial ketat terhadap etnis minoritas, termasuk Uyghur.
4.	Chen Mingguo	Direktur Biro Keamanan Publik Xinjiang dan Wakil Ketua Pemerintah Daerah Xinjiang.	Sebagai kepala kepolisian Xinjiang, Chen dianggap bertanggung jawab langsung atas sistem penahanan besar-besaran, pengawasan digital, dan pembatasan kebebasan sipil. Keterlibatannya termasuk penindasan sistematis terhadap hak asasi minoritas Muslim di Xinjiang
5.	Biro Keamanan Publik XPCC	Organisasi ekonomi dan paramiliter milik negara di Xinjiang, Tiongkok, yang menjalankan kewenangan administratif dan mengendalikan kegiatan ekonomi di Xinjiang	Lembaga keamanan milik negara yang mengelola operasi penahanan massal, kerja paksa, dan represi terhadap populasi Uyghur. XPCC PSB memainkan peran kunci dalam menjalankan kebijakan yang dituding sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sumber: Steptoe (2021)

Sebagai reaksi, Tiongkok membalas dengan menjatuhkan sanksi terhadap anggota parlemen Uni Eropa dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penjatuhan sanksi. Situasi ini menyebabkan terhentinya negosiasi mengenai Perjanjian Investasi Komprehensif (CAI) antara Uni Eropa dan Tiongkok, karena parlemen Uni Eropa mensyaratkan pencabutan sanksi sebagai prasyarat untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Ketegangan berdampak langsung terhadap hubungan ekonomi, perdagangan, dan diplomasi multilateral.

Pada September 2022, Komisi Uni Eropa telah mengusulkan sebuah regulasi yang melarang masuknya produk yang dihasilkan melalui kerja paksa ke dalam pasar Uni Eropa. Regulasi ini memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menahan, menyita, atau memerintahkan penarikan produk dari pasar Uni Eropa jika terbukti bahwa produk tersebut dibuat dengan menggunakan kerja paksa, tanpa memperhatikan lokasi produksinya (European Commission 2022). Secara keseluruhan, regulasi ini mencakup semua produk yang dihasilkan dengan kerja paksa, termasuk yang berasal dari luar Uni Eropa, dan berlaku untuk seluruh pelaku ekonomi di Uni Eropa, termasuk usaha kecil dan menengah

Selain Uni Eropa, Amerika Serikat juga menunjukkan sikap kritis terhadap Tiongkok. Pada tanggal 23 Desember 2021, Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang *Uyghur Forced Labor Prevention Act* (UFLPA) yang mulai berlaku pada 21 Juni 2022 (U.S. Customs and Border Protection 2025). Undang-Undang ini melarang impor barang dari Xinjiang kecuali jika perusahaan dapat membuktikan bahwa barang tersebut bebas dari kerja paksa (U.S. Customs

and Border Protection 2024). Hal ini berdampak besar bagi ekspor Tiongkok, terutama produk tekstil dan solar, karena Xinjiang merupakan produsen utama kapas dan polysilicon di dunia. Tindakan tersebut menempatkan Tiongkok dalam posisi defensif di mata komunitas internasional, dan memperkuat persepsi global bahwa negara tersebut tidak transparan dalam urusan ketenagakerjaan.

Selain itu, Amerika Serikat juga menambahkan sejumlah perusahaan Tiongkok ke dalam daftar badan yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Xinjiang. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut terdapat produsen tekstil, elektronik, dan bahan kimia yang diduga menggunakan kerja paksa dalam proses produksi mereka. Perusahaan tersebut dikenai sanksi berupa aktivitas ekspor dan impor barang mereka di blokir hingga mereka terbukti jelas bebas kerja paksa. Berikut data perusahaan Tiongkok yang dikenai sanksi dan diblokir oleh AS:

Tabel 4. Data Perusahaan Tiongkok yang Diblokir oleh AS

No.	Nama Perusahaan	Sektor Industri	Tindakan AS
1.	Camel Group Co., Ltd	Baterai	UFLPA Entity List
2.	Ninestar Corporation & Geehy Semiconductor	Elektronik (Printer, semikonduktor)	UFLPA Entity List
3.	Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd. & Xinjiang Zhongtai Chemical Co. Ltd	Kimia, Tekstil, Bahan Bangunan	UFLPA Entity List
4.	Chenguang Biotech Group & Chenguang Biotech Yanqi	Kimia & Pangan (Bumbu, Pewarna Makanan, Rempah-Rempah)	UFLPA Entity List
5.	Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co.	Tekstil	UFLPA Entity List

	(XTFT)		
6.	Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd	Tekstil	UFLPA Entity List

Sumber: Rights DD (2023)

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik , Tiongkok menghadapi risiko isolasi dalam sistem internasional dan kehilangan dukungan dari mitra-mitra dagang. Dalam situasi seperti ini, keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022 dinilai langkah strategis untuk merespons tekanan geopolitik tanpa harus menunjukkan kelemahan di hadapan lawan politiknya. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Tiongkok mencoba menegaskan bahwa mereka tetap komitmen terhadap norma internasional, sekaligus berupaya memperbaiki reputasinya di mata dunia. Menurut William D. Coplin, negara akan cenderung menyesuaikan kebijakan luar negerinya berdasarkan dinamika lingkungan eksternal jika hal tersebut mengancam kepentingan nasional jangka panjang.

3.2.2 Faktor Ekonomi Internasional

Faktor ekonomi internasional juga menjadi pendorong penting dalam pengambilan keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* pada tahun 2022. Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi global yang sangat bergantung pada sektor ekspor dan aliran investasi asing. Ketergantungan pada sektor ekspor dan investasi asing membuat Tiongkok sangat sensitif terhadap persepsi internasional, terutama dalam hal reputasi perdagangan dan kelayakan investasi. Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang,

termasuk dugaan kerja paksa, telah menimbulkan ketidakpercayaan dari komunitas bisnis internasional terhadap rantai pasok yang berbasis di Tiongkok.

Dampak dari tekanan ekonomi global terlihat dari penurunan arus masuk investasi asing langsung (FDI) ke Tiongkok. Data dari *World Bank* menunjukkan bahwa FDI Tiongkok mengalami penurunan tajam dari USD 344,1 miliar pada tahun 2021 menjadi USD 190,2 miliar pada tahun 2022. Penurunan FDI menggambarkan meningkatnya kehati-hatian investor asing terhadap isu sosial dan regulasi yang berkaitan dengan hak-hak buruh di Tiongkok. Selain itu, beberapa perusahaan multinasional seperti H&M, Nike, dan Adidas sempat memutuskan hubungan dagang dengan pemasok dari Xinjiang akibat tekanan dari konsumen global dan kampanye hak asasi manusia.

Ekspor Tiongkok yang sangat dominan dalam pasar global, khususnya di sektor tekstil, elektronik, dan energi terbarukan, menjadikannya sangat rentan terhadap boikot atau regulasi baru dari negara-negara mitra dagang. Wilayah Xinjiang merupakan penghasil utama kapas dan polysilicon dimana merupakan komoditas penting untuk industri tekstil dan panel surya global. Ketika negara-negara seperti Amerika Serikat menerapkan peraturan ketat seperti UFLPA, akses pasar bagi produk Tiongkok menjadi terancam.

3.2.3 Faktor Politik Internasional

Faktor politik internasional juga memainkan peran penting dalam mendorong Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022. Dalam sistem internasional, reputasi politik sebuah negara sangat menentukan tingkat kepercayaan dan kerja sama dari aktor-aktor global

lainnya. Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan negara anggota International Labour Organization (ILO), memiliki tanggung jawab untuk menjaga citra sebagai negara yang mematuhi norma-norma internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan.

Tiongkok menghadapi tekanan politik internasional yang cukup besar akibat laporan dari berbagai lembaga internasional mengenai kondisi HAM di wilayah Xinjiang. Salah satu laporan penting berasal dari Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM sistematis terhadap etnis Uyghur, termasuk penahanan massal dan kerja paksa (OHCHR 2022). Laporan tersebut memperkuat desakan dari negara-negara Barat agar Tiongkok menunjukkan komitmen nyata terhadap penghormatan hak asasi manusia.

Pada Mei 2021, ILO menyelenggarakan seminar tripartit bersama dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok (MOHRSS) di Beijing. Seminar ini mempertemukan perwakilan dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, Federasi Serikat Buruh Seluruh Tiongkok (ACFTU), Konfederasi Perusahaan Tiongkok, Komite Urusan Hukum Kongres Rakyat Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Kehakiman, dan lembaga pemerintah terkait lainnya yang menghadiri seminar tersebut untuk membahas kelayakan ratifikasi melalui analisis kesenjangan untuk mengevaluasi kesiapan hukum dan kelembagaan Tiongkok dalam mengadopsi kedua konvensi tersebut (International Labour Organization 2021). Hasil diskusi

menyimpulkan bahwa secara hukum, sistem ketenagakerjaan Tiongkok tidak memiliki hambatan substansial untuk meratifikasi Konvensi No. 29 dan 105, karena beberapa prinsip dasar dari konvensi tersebut telah terintegrasi ke dalam kebijakan domestik mereka, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Tiongkok tahun 1995 yang memuat larangan eksploitasi tenaga kerja, Undang-Undang Kontrak Kerja tahun 2008 yang mewajibkan perjanjian kerja tertulis guna mencegah kerja paksa.

Tiongkok dituntut untuk menunjukkan langkah konkret agar dapat dianggap sejajar dengan negara-negara lain dalam hal perlindungan pekerja. Ratifikasi Konvensi No.29 dinilai sebagai langkah diplomatik untuk mengurangi tekanan dalam forum internasional sekaligus memperkuat posisi tawar Tiongkok dalam berbagai negosiasi multilateral. Pada 20 April 2022, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok secara resmi menyetujui ratifikasi dua konvensi tersebut. Kemudian pada 12 Agustus 2022, Duta Besar Tiongkok untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, menyerahkan dokumen ratifikasi secara langsung kepada Direktur Jenderal ILO saat itu, Guy Ryder.

Selain itu, Tiongkok tengah berusaha meningkatkan pengaruh politik globalnya melalui proyek-proyek seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan keikutsertaan aktif dalam organisasi multilateral seperti BRICS dan G20. Tiongkok perlu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai internasional agar tidak dipandang sebagai negara yang mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Maka, ratifikasi Konvensi No.29 juga mencerminkan strategi Tiongkok untuk

memperbaiki relasi politiknya dengan komunitas internasional dan mengurangi isolasi diplomatik yang terjadi akibat tekanan yang terus meningkat.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keputusan Tiongkok untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022 merupakan langkah strategis yang tidak hanya mencerminkan respons terhadap tekanan global, tetapi juga hasil dari perhitungan politik domestik, kalkulasi ekonomi, serta posisi dan kepentingan Tiongkok dalam tatanan internasional. Melalui pendekatan *Decision Making Theory* dari William D. Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga determinan utama, yaitu politik dalam negeri, konteks internasional, serta kondisi ekonomi dan militer.

Dari aspek politik domestik, peran Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai aktor utama dalam sistem pemerintahan yang sangat terpusat menjadi faktor penentu. PKT memiliki kekuasaan penuh dalam mengarahkan arah kebijakan luar negeri. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, keputusan strategis seperti ratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO tidak lepas dari tujuan politik internal, yakni mempertahankan legitimasi dan stabilitas domestik, serta membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab di mata internasional. Peran lembaga birokrasi seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial (MoHRSS) sangat penting dalam menerjemahkan arahan elite politik menjadi kebijakan yang dijalankan di lapangan. Birokrasi tidak bersifat deliberatif, namun lebih berperan sebagai pelaksana politik dari partai penguasa.

Selain partai dan birokrasi, kelompok kepentingan (*interest influencers*) seperti pelaku industri, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara juga berkontribusi dalam membentuk kebijakan ini. Banyak sektor industri di Tiongkok, khususnya yang terlibat dalam ekspor seperti tekstil, elektronik, dan energi, merasa terdampak langsung dari tuduhan praktik kerja paksa. Ancaman pemboikotan dan sanksi dari negara-negara Barat menyebabkan kekhawatiran akan kerugian ekonomi yang besar. Dalam kondisi seperti ini, kelompok kepentingan mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah yang bisa melindungi kelangsungan bisnis mereka, salah satunya melalui ratifikasi konvensi sebagai bentuk kompromi politik dan ekonomi.

Peran opini publik juga tidak bisa diabaikan. Walaupun Tiongkok merupakan negara dengan sistem otoriter, masyarakat tetap aktif menyuarakan keresahan mereka melalui media sosial seperti Weibo, Douyin, dan WeChat. Gerakan seperti 996.ICU dan protes buruh kurir mencerminkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kondisi kerja di dalam negeri. Pemerintah, meskipun menerapkan kontrol informasi yang ketat, tetap memperhatikan dinamika opini publik ini sebagai bagian dari usaha menjaga stabilitas sosial. Ratifikasi konvensi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka responsif terhadap kritik publik dalam negeri.

Dari sisi ekonomi, Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global sangat bergantung pada hubungan dagang dan arus investasi asing. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan tentang dugaan kerja paksa, terutama di wilayah Xinjiang, telah menimbulkan tekanan besar terhadap citra produk-produk

Tiongkok di pasar global. Hal ini berdampak pada turunnya minat investor dan meningkatnya hambatan dagang. Organisasi seperti NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional) melihat bahwa dengan memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dan meratifikasi konvensi internasional, Tiongkok bisa memperkuat daya saingnya dan meningkatkan kepercayaan pasar. Langkah ini juga sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Lima Tahun ke-14, yang menekankan pentingnya *high-quality development*.

Selain faktor internal, konteks internasional juga memainkan peran yang sangat penting dalam keputusan ini. Tiongkok menghadapi tekanan diplomatik yang cukup besar dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kerja paksa di Xinjiang. Penerapan sanksi seperti *Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA)* oleh Amerika Serikat pada tahun 2022 semakin meningkatkan tekanan internasional terhadap Tiongkok. Berbagai produk dari wilayah Xinjiang diblokir dari pasar global, yang berdampak langsung pada ekonomi Tiongkok, terutama pada sektor-sektor strategis seperti tekstil dan energi terbarukan.

Ratifikasi Konvensi ILO No.29 juga menjadi bagian dari strategi diplomasi Tiongkok untuk memperbaiki citra dan mengurangi isolasi internasional. Dalam forum-forum global seperti G20, BRICS, dan ILO sendiri, Tiongkok berusaha menampilkan diri sebagai negara yang patuh terhadap norma internasional dan aktif dalam kerja sama multilateral. Hal ini penting untuk

menjaga posisi tawar Tiongkok dalam berbagai negosiasi ekonomi dan politik global.

Tidak hanya itu, faktor geopolitik juga memberikan pengaruh tersendiri. Wilayah Xinjiang yang menjadi pusat perhatian dunia karena dugaan kerja paksa merupakan wilayah yang sangat strategis secara geografis. Xinjiang merupakan pusat logistik penting dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI), sekaligus penghasil utama kapas dan polysilicon nasional. Ketegangan di wilayah ini dapat berpengaruh besar terhadap stabilitas regional dan konektivitas global Tiongkok. Oleh karena itu, ratifikasi konvensi ini juga bisa dilihat sebagai upaya Tiongkok untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mengelola masalah domestiknya dengan cara yang dianggap lebih dapat diterima oleh komunitas internasional.

Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan Tiongkok meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022 merupakan hasil dari kombinasi dari 3 determinan dimana determinan-determinan ini memperkuat alasan konvensi itu perlu diratifikasi oleh Tiongkok. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Politik domestik yang dikendalikan oleh PKT, tekanan ekonomi dan kepentingan investasi, serta tekanan internasional dari negara dan lembaga global, semuanya ikut membentuk keputusan ini. Namun, meskipun ratifikasi sudah dilakukan, tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar. Dugaan kerja paksa di berbagai sektor dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan serius bagi Tiongkok dalam mewujudkan janji-janji yang telah disampaikan di tingkat internasional.

4.2 Rekomendasi

Pada penelitian ini, penulis membahas bagaimana pemerintah Tiongkok akhirnya memutuskan untuk meratifikasi *Forced Labour Convention 1930 (No.29)* ILO pada tahun 2022, dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Berdasarkan hal-hal yang telah penulis bahas dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu ketenagakerjaan dan kebijakan luar negeri Tiongkok.

Pertama, peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk meneliti implementasi pasca-ratifikasi konvensi tersebut oleh Tiongkok, khususnya dalam menilai efektivitas kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan buruh di wilayah-wilayah sensitif seperti Xinjiang. Kedua, dapat pula diteliti bagaimana pengaruh ratifikasi ini terhadap hubungan dagang Tiongkok dengan negara-negara Barat, terutama di tengah meningkatnya regulasi global terkait kerja paksa. Ketiga, peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk membandingkan kasus Tiongkok dengan negara-negara lain yang memiliki dinamika serupa dalam merespons tekanan internasional terhadap isu HAM.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal ketersediaan data primer, namun penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah konkrit terkait penghapusan kerja paksa dan perlindungan hak-hak buruh secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- American Journal of International Law. 2022. "United States Pressures China Over Human Rights Abuses." *American Journal of International Law*. <https://doi.org/10.1017/ajil.2022.8>.
- Amnesty Internasional. 2022. *Laporan Amnesty Internasional 2021/2022 : Kondisi Hak Asasi Manusia Dunia*.
- China Internet Network Information Center. 2022. "The 49th Statistical Report on the Internet Development in China." <http://www.cnnic.net.cn>.
- China Labour Bulletin. 2023. "Migrant workers and their children." (September).
- Coplin, William D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis ED.2*. N.p.: Sinar Baru Algensindo.
- "Dampak Global: Isu Uyghur Mengubah Hubungan Diplomatik di Asia Tengah dan Timur." 2024. Pusat Studi Uyghur | Center for Uyghur Studies. <https://id.uyghurstudy.org/dampak-global-isu-uyghur-mengubah-hubungan-diplomatik-di-asia-tengah-dan-timur/>.
- European Commission. 2022. "Questions and Answers: Prohibition of products made by forced labour in the Union Market." (September). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5416.
- Human Rights Watch. 2013. "China: Fully Abolish Re-Education Through Labor." (Januari). <https://www.hrw.org/news/2013/01/08/china-fully-abolish-re-education-through-labor>.
- International labour Organization. 2021. "The ILO-MOHRSS Tripartite Seminar on the Forced Labour Convention (No. 29) and Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention (P29) held in Beijing."
- International Labour Organization. 2022. "ILO welcomes China's move towards the ratification of two forced labour Conventions." (April).
- International Labour Organization. 2022. "China ratifies the two ILO Fundamental Conventions on forced labour." (August). <https://www.ilo.org/resource/news/china-ratifies-two-ilo-fundamental-conventions-forced-labour>.

- International Labour Organization. 2022. "China ratifies the two ILO Fundamental Conventions on forced labour." (Agustus).
- Laksono, Totok M., and Florensia Devina. 2023. "Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara China." *Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 56-67.
- Li, Bo, Rui Mei Wang, and Quan Lu. 2022. "Land Tenure and Cotton Farmers' Land Improvement: Evidence from State-Owned Farms in Xinjiang, China." *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010117>.
- Liusanda, Julia A. 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Ditinjau Dari Konvensi ILO Tentang Buruh Migran." *LEX ET SOCIETATIS* 7, no. 5 (07): 97. <https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24728>.
- Macbean, Nicola. 2022. "China's Ratification of the ILO Forced Labour Conventions: A Hollow Gesture?" (Juli).
- Ministry of Foreign Affairs People's Republic of China. 2022. "Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin's Regular Press Conference on April 21, 2022." April 21, 2022.
- Office of the United States Trade Representative. 2023. "Forced Labor Enforcement Task Force Publishes Updated Uyghur Forced Labor Prevention Act Strategy." (Agustus).
- OHCHR. n.d. "Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) | OHCHR." Accessed November 11, 2024. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/forced-labour-convention-1930-no-29>.
- OHCR. 2022. "OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China."
- Qingmin, Zhang. 2016. "Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy-making." *The Chinese Journal of International Politics* 9, no. 4 (July): 435-458. <https://doi.org/10.1093/cjip/pow007>.
- Schaefer, Sonja. 2023. "CrossRef citations to date 7 Altmetric Listen Articles The muddled governance of state-imposed forced labour: multinational

- corporations, states, and cotton from China and Uzbekistan.” *Taylor&Francis*.
- Silver, Laura, Kat Devlin, and Christine Huang. 2020. “Unfavorable Views of China Reach Historic Highs in Many Countries.” Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/>.
- Ssousan, Guy, Evan T. Abrams, Meredith Rathbone, and Alexandra Melia. 2021. “EU, UK, US and Canada Announce Coordinated Xinjiang Sanctions.” *Steptoe*, Maret 25, 2021.
- U.S. Customs and Border Protection. 2022. “Uyghur Forced Labor Prevention Act.” (juni).
- U.S. Customs and Border Protection. 2024. “FAQs: Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Enforcement.” <https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor/faqs-uflpa-enforcement>.
- U.S. Customs and Border Protection. 2025. “Implementing the Uyghur Forced Labor Prevention Act: A Challenge Worth the Effort.” <https://www.cbp.gov/frontline/implementing-uyghur-forced-labor-prevention-act>.
- Wang, Fuxi, Bernard Gan, Yanyuang Chen, Lin Peng, Jiaojiao Feng, Liquian Yang, and Yiheng Xi. 2019. “China’s Employment Contract Law: Does it deliver employment security?” *The Economic and Labour Relations Review*. <https://doi.org/10.1177/1035304619827758>.
- Wang, Tingting, Shaoyang Chen, Yanwei Gong, and Chuoran Li. 2024. “Evolution of the South China Sea geo-pattern based on the “geo-potential-strategic triangle” framework.” *Ocean & Coastal Management* 248 (February). <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106963>.
- Wati, Risma, Winda Wati, and Sarah D. Hanifa. 2023. “ANALISIS PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK NEGARA CHINA DAN RUSIA.” *Jurnal Administrasi Publik* 1 (Februari): 64.

- World Bank. 2024. "China Overview: Development news, research, data."
<https://www.worldbank.org/en/country/china/overview>.
- Zenz, Adrian. 2023. "Innovating penal labor: Reeducation, forced labor, and coercive social integration in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region."
The China Journal 90:1-30. <https://doi.org/10.1086/725494>.
- Zenz, Adrian. 2023. *Measuring Non-Internment State-Imposed Forced Labor in Xinjiang and Central Asia: An Assessment of ILO Measurement Guidelines*, (Nov). <https://doi.org/10.1080/23322705.2023.2270366>.